

# MENERUSKAN JALAN PERUBAHAN UNTUK INDONESIA MAJU:

**BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN  
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

## VISI MISI

**Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin**



## DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN: JALAN PERUBAHAN YANG TELAH MENUNJUKKAN KEMAJUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>PIJAKAN IDEOLOGIS MENUJU INDONESIA MAJU .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia .....</b>	<b>4</b>
1.1. Mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak.....	4
1.2. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan .....	4
1.3. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan .....	5
1.4. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.....	6
1.5. Menumbuhkan Kewirausahaan .....	6
1.6. Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	7
<b>2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing .....</b>	<b>8</b>
2.1. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila .....	8
2.2. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur .....	9
2.3. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0. ....	9
2.4. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru .....	10
2.5. Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal.....	11
2.6. Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan .....	12
<b>3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan .....</b>	<b>12</b>
3.1. Redistribusi Aset demi Pembangunan Berkeadilan.....	12
3.2. Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi .....	13
3.3. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan.....	14
3.4. Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial .....	15
3.5. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan .....	16
3.6. Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga.....	16
3.7. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antarwilayah .....	17
<b>4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan .....</b>	<b>18</b>
4.1. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi .....	18
4.2. Mitigasi Perubahan Iklim .....	18
4.3. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup .....	18
<b>5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa .....</b>	<b>19</b>
5.1. Pembinaan Ideologi Pancasila .....	19
5.2. Revitalisasi Revolusi Mental .....	20
5.3. Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial.....	20
5.4. Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya.....	21
5.5. Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan .....	22
5.6. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi .....	23
<b>6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya .....</b>	<b>23</b>
6.1. Melanjutkan Penataan Regulasi .....	24
6.2. Melanjutkan Reformasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum .....	24
6.3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi .....	25
6.4. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM .....	25
6.5. Mengembangkan Budaya Sadar Hukum .....	26
<b>7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh     Warga.....</b>	<b>27</b>

7.1	Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif .....	27
7.2	Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional .....	28
7.3	Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelijen yang Profesional dan Terpercaya .....	28
<b>8.</b>	<b>Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya .....</b>	<b>29</b>
8.1	Aktualisasi Demokrasi Pancasila .....	29
8.2	Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional .....	30
8.3	Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi .....	31
8.4	Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang Efektif dan Efisien .....	31
8.5	Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .....	31
8.6	Reformasi Pelayanan Publik .....	32
<b>9.</b>	<b>Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan .....</b>	<b>32</b>
9.1	Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis .....	33
9.2	Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah .....	33
9.3	Mengembangkan Kerja Sama Antar-Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru .....	34
<b>PENUTUP: <u>K</u>ERJA BERSAMA UNTUK JALAN PERUBAHAN .....</b>		<b>35</b>

## **PENDAHULUAN: JALAN PERUBAHAN YANG TELAH MENUNJUKKAN KEMAJUAN**

Dalam waktu empat tahun ini, kita telah memulai perjalanan di jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan nilai-nilai *akhlakul karimah* dan semangat gotong royong. *Alhamdulillah*, selama empat tahun tersebut Nawacita sebagai wujud jalan perubahan telah mulai memperkokoh wibawa negara, membangun sendi-sendi perekonomian, serta menjawab tantangan intoleransi dan krisis kepribadian Indonesia. Selain itu, dalam perjalanan bangsa Indonesia di jalan perubahan, berbagai lompatan kemajuan telah kita capai secara ber-gotong royong.

Orientasi pembangunan yang tadinya Jawa-sentris sudah kita transformasi menjadi orientasi pembangunan yang Indonesia-sentris, yang menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Daerah-daerah terdepan Indonesia yang dulunya terlupakan sudah kita transformasi menjadi beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang membanggakan dan menunjukkan kedaulatan bangsa kita. Desa-desa yang merupakan bagian dari lokus utama masyarakat Indonesia sudah kita transformasi menjadi kantong-kantong kekuatan Indonesia yang berdikari, dengan keberpihakan dalam wujud pengalokasian dana desa yang signifikan jumlahnya. Wilayah Indonesia yang luas dengan belasan ribu pulau sudah mulai kita sambungkan dan perkuat kesatuannya melalui penguatan konektivitas, baik melalui jalur darat, jembatan udara, dan tol laut. Hari demi hari, kebudayaan Nusantara yang berbhinneka tunggal ika, terus mendapat tempat yang terhormat dalam transformasi Indonesia menjadi sebuah negara maju, bermartabat, *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Kita juga sudah meletakkan keberpihakan yang besar kepada 40% masyarakat di lapisan terbawah, melalui pembangunan lapangan kerja, transformasi bantuan sosial yang makin diperluas, makin tepat sasaran, dan memiliki dampak nyata kepada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini terbukti dengan pertama kalinya dalam sejarah NKRI, persentase kemiskinan kita sudah mencapai angka satu digit, yaitu 9,82 persen pada Maret 2018. Tingkat kesenjangan kita berada pada titik terendah dalam enam tahun terakhir, dengan ukuran nyata Rasio Gini pada

Maret tahun 2018 kita di tingkat 0,389. Artinya, perjalanan kita untuk memenuhi janji kemerdekaan sudah berada di jalur yang benar.

## **PIJAKAN IDEOLOGIS MENUJU INDONESIA MAJU**

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, berbagai lompatan kemajuan yang telah kita capai dalam empat tahun terakhir menjadi fondasi yang kuat untuk bangsa Indonesia dapat bergerak lebih maju, lebih cepat, lebih kuat ke depan. Fondasi yang kuat itu memungkinkan kita untuk melangkah menyongsong masa depan. Kita yakin bisa menghadapi semua tantangan tersebut karena memiliki Pancasila. Pancasila adalah bintang pengarah, penggerak, sumber inspirasi, dan sekaligus pemersatu.

Kita meyakini bahwa Pancasila akan selalu mengalir di denyut nadi seluruh rakyat Indonesia sampai akhir zaman. Pancasila tetap menjadi dasar Negara Republik Indonesia, sebagai panduan ideologi bangsa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetap menjadi pedoman bagi Nusa dan Bangsa, dalam usaha mewujudkan janji kemerdekaan kita, serta tetap menjadi jiwa kepribadian.

Negara Pancasila kita wujudkan melalui jalan perubahan sebagai bangsa merdeka yang berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sehingga, kita bermartabat dan memiliki harga diri dalam pergaulan antar-bangsa, yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.

Untuk itu, sebagai kelanjutan, percepatan, pengembangan, serta pemajuan dari visi di tahun 2014-2019, selama 5 tahun ke depan pekerjaan kami akan dipandu oleh visi sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Persatuan Indonesia dan gotong royong terus menjadi kekuatan kerja bersama kita dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selama empat tahun ini kita sudah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka, dalam lima tahun ke depan, kita yakin nilai-nilai persatuan, *akhlakul karimah*, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi

negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian, saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka sesungguhnya saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia Maju; Indonesia yang memenuhi cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

## MISI

Upaya meneruskan jalan perubahan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ditempuh dengan sembilan misi.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sembilan misi ini merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia (berpusat pada manusia), dengan rincian program aksi sebagai berikut:

## **1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**

Setelah tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur, tahapan besar berikutnya kita akan fokus pada investasi peningkatan kualitas manusia Indonesia yang maju, unggul, dan sejahtera. Untuk itu, ada enam program aksi yang ditawarkan.

### **1.1. Mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak**

*Stunting* atau gagal tumbuh merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia serta ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Oleh karena itu, kita akan menurunkan angka *stunting* dengan menjamin bahwa setiap anak Indonesia bisa tumbuh kembang dengan baik melalui upaya:

- Mempercepat pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan.
- Memperbaiki pola asuh keluarga.
- Memperbaiki fasilitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

### **1.2. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan**

Setiap manusia Indonesia harus sehat sehingga bisa mengembangkan diri sesuai potensinya serta menjadi lebih produktif. Oleh karena itu, kita akan fokus pada investasi manusia di bidang kesehatan melalui:

- Memperkuat program promotif dan preventif dengan pembudayaan gerakan hidup sehat dalam masyarakat serta peningkatan pengawasan kualitas obat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat.
- Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, terutama SPAM dan perbaikan sanitasi, seperti tiap rumah tangga memiliki jamban, untuk meningkatkan kualitas hidup sehat.
- Meningkatkan akses warga miskin di seluruh pelosok tanah air untuk mendapatkan bantuan kesehatan (PBI JKN-KIS).
- Meningkatkan efektivitas program JKN-KIS melalui percepatan peningkatan kepesertaan JKN-KIS serta peningkatan kualitas layanan kesehatan program JKN-KIS.

- Mempercepat pemerataan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk di desa-desa dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan skema DAK Fisik.
- Mempercepat upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

### **1.3. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan**

Investasi SDM di bidang pendidikan akan diarahkan untuk meningkatkan akses, keadilan, dan pemerataan kualitas pendidikan yang dikuatkan oleh ekosistem pendidikan yang mencakup keluarga, masyarakat, dan sekolah. Oleh karena itu, fokus reformasi di bidang pendidikan akan diletakkan pada:

- Mempercepat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.
- Mempercepat pemerataan penyediaan sarana-prasarana pendidikan dan infrastruktur pendukungnya di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang infrastruktur pendidikannya masih kurang.
- Meningkatkan akses warga miskin untuk mendapatkan bantuan pendidikan (Program Indonesia Pintar).
- Memperluas beasiswa afirmasi dengan memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa miskin, di wilayah 3T, santri dan siswa lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, untuk memperoleh beasiswa pendidikan (Bidik Misi maupun LPDP), serta memperluas akses mahasiswa mendapatkan pinjaman dana pendidikan dari perbankan.
- Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan standar pendidikan, BOS berdasarkan kinerja, pemerataan sebaran, kualitas, dan peningkatan kesejahteraan guru/dosen dan Tenaga Kependidikan, termasuk percepatan penyetaraan pendidikan bagi pesantren, dayah, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya sejajar dengan sekolah umum.
- Mendukung peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan di Madrasah, Pondok Pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai salah satu pelaku utama dalam pendidikan karakter bangsa.
- Meningkatkan pendidikan mental karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama sebagai



nilai luhur dalam berbangsa-bernegara, nilai-nilai budi pekerti, dengan metode pembelajaran yang inovatif.

- Mempercepat gerakan literasi masyarakat dengan memperbanyak perpustakaan dan taman-taman baca, serta pemberian insentif bagi industri perbukuan nasional.

#### **1.4. Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**

Untuk menyiapkan SDM yang terampil diperlukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi. Pada empat tahun terakhir, telah dilakukan langkah-langkah perombakan dan perbaikan terhadap sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Fondasi ini akan diteruskan pada periode berikutnya.

- Meneruskan revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualifikasi SDM dalam menghadapi dunia kerja, baik Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik.
- Meneruskan revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi.
- Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana/beasiswa untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan.
- Memperkuat pelatihan vokasi kewirausahaan bagi para santri.

#### **1.5. Menumbuhkan Kewirausahaan**

Bonus demografi dan hadirnya Revolusi Industri 4.0 harus dihadapi dengan menumbuhkan wirausahawan-wirausahawan baru terutama dari kalangan generasi muda/milenial, yang difasilitasi dengan:

- Mempercepat tumbuhnya wirausahawan muda dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang melibatkan komunitas pendidikan dan sektor ekonomi kreatif.
- Mempercepat tumbuhnya *Santripreneur* melalui kemitraan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang sejenis, dengan dunia kerja.

- Mempercepat tumbuhnya wirausahawan sosial dengan pemberian insentif bagi kegiatan wirausaha sosial.
- Mendorong/memfasilitasi jenis-jenis usaha dan pekerjaan baru dengan regulasi yang lebih adaptif.
- Memberikan jaminan kemudahan berusaha serta memperbanyak penyediaan fasilitas untuk belajar dan kerja bersama (*coworking space*) dan memfasilitasi akses pada internet di tempat-tempat umum.
- Meningkatkan akses permodalan bagi wirausahawan baru dengan menggunakan model pembiayaan non-konvensional sehingga memudahkan wirausahawan baru yang tidak memiliki aset.
- Memfasilitasi perkembangan usaha rintisan dengan mengembangkan inkubator untuk mendampingi dan memfasilitasi, yang didukung oleh dunia usaha, BUMN, kampus, dan komunitas, maupun *angel investor*.
- Mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor.

#### **1.6. Menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Perempuan merupakan kunci keberhasilan negara dalam membumikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, kita harus terus mendorong perempuan Indonesia makin memiliki peran penting dalam ranah keluarga maupun publik. Sebagai Ibu bangsa, perempuan mendidik anak-anak sebagai penerus masa depan bangsa, memperbaiki mentalitas bangsa, menjaga moral keluarga, serta menggerakkan ekonomi keluarga dan masyarakat.

- Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, pemerintahan, dan pembangunan.
- Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, terutama untuk menurunkan Angka Kematian Ibu.

- Meningkatkan akses anak-anak perempuan untuk memperoleh pendidikan.
- Memfasilitasi peran perempuan/ibu dalam penguatan ekonomi keluarga.
- Memfasilitasi perempuan untuk mengakses teknologi, pembiayaan dan pendampingan inovasi, termasuk untuk merintis usaha dan menjadi wirausahawan.
- Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif.
- Meningkatkan melibatkan perempuan/ibu dalam menjaga tumbuh kembang anak serta pendidikan karakter dalam keluarga.

## **2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**

Percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi struktural telah membuka jalan bagi terbangunnya fondasi struktur perekonomian yang lebih kuat dan berdaya saing. Dengan fondasi tersebut, pada periode kedua pemerintahan, kita akan teruskan dengan upaya membuat perekonomian menjadi lebih kokoh, produktif, mandiri, dan berdaya saing sehingga mampu membuka lebih banyak lagi lapangan kerja, menekan tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Untuk itu, ada enam program aksi yang ditawarkan.

### **2.1 Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila**

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa perlu diwujudkan dalam sistem ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memantapkan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila.

- Menyelesaikan penyusunan peraturan dan perundangan tentang Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila.
- Mewujudkan pelaksanaan Sistem Perekonomian Nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila.
- Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berkelanjutan.

## **2.2 Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur**

Percepatan pembangun infrastruktur dalam empat tahun terakhir telah memberikan manfaat pada kelancaran konektivitas dan penurunan biaya logistik. Tahapan berikutnya adalah meningkatkan pemanfaatan infrastruktur pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui langkah-langkah:

- Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru dengan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang melibatkan Swasta, BUMN, maupun BUMD.
- Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.
- Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur bagi pengembangan UMKM.
- Memperluas akses perumahan/tempat tinggal/hunian dan bedah rumah bagi 5 juta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), buruh, ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri.
- Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi digital.
- Mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antar-permukiman, desa, kota, dan provinsi, dengan kerja sama antara pemerintah dan badan-badan usaha.

## **2.3 Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.**

Agar perekonomian Indonesia memiliki daya saing, maka revitalisasi industri merupakan keniscayaan. Untuk itu, ada beberapa langkah yang akan dilakukan:

- Memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari berbasis komoditas menjadi lokomotif pembangunan ekonomi.

- Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat struktur ekonomi menuju kemandirian.
- Menciptakan keterkaitan industri, baik ke depan maupun ke belakang melalui sinergi seluruh pelaku ekonomi nasional.
- Meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas di dalam negeri.
- Mengembangkan sentra-sentra inovasi serta peningkatan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi serta revitalisasi *science-technopark* untuk keperluan masyarakat serta pengembangan teknologi yang diperlukan di era revolusi industri 4.0.
- Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
- Meneruskan program peningkatan produksi dan pemanfaatan energi fosil secara efisien serta meningkatkan nilai tambah untuk kemajuan perekonomian nasional.
- Meneruskan dan mengokohkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mencapai target yang terukur pada tahun 2025, termasuk memberikan akses kepada rakyat untuk mengembangkan dan mengelola sumber-sumber energi terbarukan.
- Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
- Mengembangkan industri kelautan/kemaritiman, serta mendorong investasi infrastruktur pendukungnya.

#### **2.4 Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru**

Selain ekonomi berbasis sumber daya alam, kita juga memiliki beberapa potensi ekonomi baru yang perlu dikembangkan secara merata. Potensi ekonomi baru itu berbasis kekayaan alam dan juga modal sosial budaya yang bisa dimanfaatkan

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Langkah-langkah yang bisa dilakukan:

- Mempercepat pengembangan sektor pariwisata yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya. Fokus pada melanjutkan pembangunan 10 destinasi wisata baru (“Bali Baru”).
- Mempercepat pengembangan ekonomi dan industri kreatif dengan terobosan strategi kebijakan dan insentif melalui Badan Ekonomi Kreatif.
- Mengembangkan industri jasa keuangan berbasis syariah.
- Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi *online*, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

## **2.5 Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal**

Reformasi struktural dan reformasi fiskal adalah kunci peningkatan daya saing perekonomian nasional. Arahnya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan berusaha, dan menciptakan *level of playing field* yang berkeadilan. Langkah yang akan dilakukan:

- Melanjutkan reformasi struktural dan kemudahan berusaha secara terpadu dan berbasis teknologi informasi.
- Melanjutkan reformasi kebijakan fiskal untuk menghadirkan APBN yang sehat, adil, dan mandiri, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, penurunan tingkat kesenjangan, dan peningkatan produktivitas rakyat.
- Melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing.
- Optimalisasi PNBPN dengan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
- Memperkuat sinergi tiga pilar (kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil) guna memperbaiki ketersediaan sumber pembiayaan, menurunkan tingkat bunga, sekaligus mendorong produksi nasional.

- Meningkatkan penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri sehingga bisa dimanfaatkan untuk ekonomi nasional.

## **2.6 Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan**

Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu, upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:

- Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
- Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
- Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
- Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
- Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi.

## **3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**

Pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan adalah janji kemerdekaan yang harus dituntaskan. Pada periode pertama pemerintahan, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. Begitu pula dengan kesenjangan pendapatan antarwarga terus ditekan sehingga mencapai Rasio Gini sebesar 0,389. Upaya memperkecil ketimpangan antardaerah juga menjadi fokus perhatian pada periode pertama pemerintahan dan dilanjutkan ke periode kedua melalui tujuh program aksi:

### **3.1 Redistribusi Aset demi Pembangunan Berkeadilan**

Redistribusi aset atau reforma agraria dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Selain itu, reforma agraria juga menjadi bagian dari penyelesaian sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah.

- Mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.
- Melanjutkan pendampingan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial sehingga lebih produktif.
- Melanjutkan percepatan legalisasi (sertifikasi) atas tanah-tanah milik rakyat dan tanah wakaf, sehingga memiliki kepastian hukum dan mencegah munculnya sengketa atas tanah.

### **3.2 Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi**

UMKM dan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM, maka akan dilakukan:

- Meningkatkan akses pembiayaan sektor produktif bagi UMKM dengan skema Kredit Usaha Rakyat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha.
- Meningkatkan dana bergulir untuk penguatan akses dan penguatan modal bagi UMKM, termasuk usaha mikro pesantren, disertai program pendampingan dan kemitraan dari BUMN dan Kementerian/Lembaga terkait.
- Meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha-usaha ultra-mikro.
- Meneruskan reformasi koperasi dengan fasilitasi peningkatan kualitas koperasi, sehingga meningkatkan kontribusinya pada perekonomian nasional dan menyejahterakan anggotanya.
- Mendorong berkembangnya koperasi, terutama koperasi produksi, untuk meningkatkan daya saing industri kecil dan kegiatan ekonomi masyarakat bawah.
- Memfasilitasi koperasi dan UMKM untuk siap menghadapi era digital.
- Membantu usaha kecil dan menengah untuk mengeksport produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital.



- Memberikan insentif pajak bagi UMKM.
- Meningkatkan layanan dan pendampingan usaha untuk percepatan perkembangan usaha, khususnya bagi usaha ultra-mikro, usaha mikro, dan kecil sehingga bisa naik kelas.
- Meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat.
- Meneruskan/meningkatkan peremajaan, pemeliharaan, pendampingan, penyuluhan, kemitraan, dan legalisasi tanah perkebunan rakyat, agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani perkebunan rakyat meningkat.
- Mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat *business to business* ataupun *business to consumers*.

### **3.3 Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan**

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami akan terus memperkuat ekonomi kerakyatan dengan memperbanyak kerja sama dengan semangat gotong royong dan patriotism, termasuk di komunitas umat beragama.

- Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi, yang dilakukan dengan memfasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budi daya dan pascapanen, mengembangkan aspek agrobisnis yang dapat meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong agar terjadi konsolidasi kelompok tani menjadi besar sehingga memiliki daya saing yang kuat.
- Meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui inovasi teknologi yang dapat menguatkan budi daya ikan yang berkelanjutan dan produktif, salah satunya adalah dengan pengembangan *offshore aquaculture*.
- Mengembangkan program kemitraan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi keagamaan.
- Meningkatkan kinerja lembaga ekonomi keumatan berbasis masyarakat dalam kancah perekonomian nasional maupun global.
- Pembenahan pengelolaan zakat dan wakaf secara produktif, sehingga bisa mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan.

- Menjadikan masjid dan rumah-rumah ibadah sebagai pusat kesejahteraan/kemakmuran umat.
- Meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pendirian serta penyebaran lembaga keuangan Wakaf Mikro dan Bank Mikro Nelayan untuk membangkitkan ekonomi usaha ultra-mikro dan mikro.
- Mendorong perkembangan jasa keuangan Syariah menjadi salah satu lembaga ekonomi utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- Menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor.
- Membentuk unit usaha pesantren melalui kemitraan swasta, BUMN, dan Kementerian/Lembaga dengan didukung kebijakan yang dapat memperluas akses pasar dan insentif bagi pesantren, mualimin/mualimat, dayah, dan lembaga pendidikan keagamaan sejenis.

### **3.4 Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial**

Warga miskin harus mendapatkan jaminan perlindungan dan bantuan sosial sehingga bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk itu, kita akan fokus pada:

- Menjaga daya beli melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Melanjutkan reformasi sistem penyaluran bantuan sosial seperti KIP, PBI JKN-KIS, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai sehingga lebih sederhana, transparan, tepat sasaran, terintegrasi, serta memperhatikan penciptaan *multiplier* bagi ekonomi UMKM.
- Memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat dengan target sasaran yang tepat.
- Perluasan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai secara bertahap.
- Melanjutkan reformasi sistem subsidi agar lebih tepat sasaran.

### **3.5 Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan**

Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan menjadi fokus dari pemanfaatan dana desa. Dana desa bukanlah satu-satunya instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, karena desa memiliki modal sosial yang sangat kuat, yakni: gotong royong. Dengan revitalisasi gotong royong dan partisipasi warga, dana desa lebih difokuskan untuk menyentuh 40 persen lapisan masyarakat terbawah di perdesaan, melalui langkah-langkah:

- Memperbaiki pelayanan dasar bagi warga desa, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik desa.
- Mengembangkan ekonomi produktif dan industri perdesaan, terutama digerakkan oleh BUMDES dan pelaku-pelaku UMKM/Koperasi di desa untuk mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru di perdesaan.
- Mengembangkan kawasan perdesaan untuk menciptakan produk unggulan dengan basis sumber daya ekonomi lokal.
- Meningkatkan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, sehingga lebih adaptif untuk melakukan inovasi, partisipatif-inklusif, transparan, serta akuntabel.
- Memperkuat fungsi pendamping desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan desa secara efektif dan efisien.

### **3.6 Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga**

Pengurangan angka kemiskinan memerlukan upaya berkelanjutan untuk penguatan ekonomi keluarga. Salah satu subjek utama penguatan ekonomi keluarga adalah perempuan. Dalam perannya mengelola keuangan keluarga, perempuan dengan mendayagunakan sumber ekonomi serta pemanfaatan modal sosial yang dimilikinya, memegang peran kunci untuk menjaga keberlangsungan dan bahkan meningkatkan ekonomi keluarga.

- Peningkatan penghasilan dengan skema insentif pembiayaan, melalui skema KUR, kredit ultra-mikro dan dana bergulir, serta upaya pendampingan yang berkelanjutan dalam kelompok usaha bersama.

- Pemenuhan kebutuhan keluarga berbasis komunitas melalui pengembangan usaha industri rumahan.
- Pendidikan literasi finansial dan pengelolaan keuangan keluarga.
- Fasilitasi program investasi inklusif untuk keuangan keluarga.

### **3.7 Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antarwilayah**

Kita akan mendorong dan membantu daerah untuk mengembangkan potensinya masing-masing, yang dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di semua wilayah.

- Mengembangkan sektor ekonomi dan produk unggulan yang menciptakan nilai tambah bagi daerah dan warganya.
- Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah.
- Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*).
- Mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha.
- Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil serta terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan industri unggulan.
- Memaksimalkan kerja sama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk pemajuan ekonomi daerah.
- Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan antarwarga dan juga antarwilayah.
- Meningkatkan peran kelurahan dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan perkotaan melalui penataan pengelolaan fiskal.

#### **4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

Pembangunan ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan hidup agar pembangunan menjadi berkelanjutan.

##### **4.1 Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi**

Untuk mengendalikan penggunaan ruang, maka diperlukan kebijakan tata ruang yang terintegrasi untuk memastikan ruang digunakan secara berkeadilan.

- Melanjutkan kebijakan Satu Peta untuk menghindari tumpang tindih penggunaan ruang.
- Pengendalian dan pengawasan kepatuhan pelaksanaannya serta menindak tegas penyimpangannya.

##### **4.2 Mitigasi Perubahan Iklim**

Dampak perubahan iklim menjadi permasalahan global. Indonesia harus mengambil bagian dari upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

- Pencegahan kebakaran hutan.
- Penanaman kembali lahan-lahan kritis.
- Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi setempat serta ramah terhadap lingkungan.
- Melanjutkan konservasi lahan gambut.
- Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.
- Meningkatkan pendidikan konservasi lingkungan yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas masyarakat adat.
- Memperbanyak hutan kota dan ruang terbuka hijau.

##### **4.3 Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup**

Kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran udara, limbah B3, penebangan liar, pencurian ikan dan terumbu karang, dan penambangan liar menjadi ancaman pada *human security*.

- Merehabilitasi kerusakan lingkungan untuk menjamin daya dukung lingkungan secara berkelanjutan termasuk rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi laut, serta Daerah Aliran Sungai (DAS).

- Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan limbah B3 serta percepatan pembangunan pusat pengolahan limbah B3 secara terpadu.
- Penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusakan lingkungan.
- Mempercepat upaya pencegahan dan rehabilitasi lingkungan akibat sampah plastik serta mendorong berkembangnya industri daur ulang.

## **5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**

Negara berkewajiban untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional. Manusia Indonesia yang ingin kita bangun bukan hanya manusia yang produktif, unggul, dan berdaya saing, tapi juga manusia Indonesia yang berkarakter dan memiliki kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila, berakhlak mulia, dan memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika.

### **5.1. Pembinaan Ideologi Pancasila**

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Kita ingin Pancasila menjadi ideologi yang bekerja, yang dapat diimplementasikan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan Ideologi Pancasila dilakukan dalam kerangka sistem dengan metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

- Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Menerapkan standardisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila dalam sistem pendidikan dan pelatihan yang direkomendasikan BPIP.
- Mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

## **5.2. Revitalisasi Revolusi Mental**

Perubahan mental karakter bangsa dari mental karakter yang negatif ke mental karakter yang positif harus menjadi strategi pembangunan manusia dan kebudayaan yang terus-menerus diinternalisasi dalam sistem pembangunan, sehingga menjadi sistemik serta mengalami pembudayaan dalam perilaku sehari-hari.

- Revolusi Mental dalam sistem pendidikan, dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran.
- Revolusi Mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.
- Revolusi Mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga.

## **5.3. Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial**

Perbedaan dalam kemajemukan bukan menjadi sumber masalah jika diikat oleh Ketunggal-ikaan, sebagai sesama saudara sebangsa setanah air. Untuk itu, semangat toleransi, kerukunan, dan persaudaraan perlu ditumbuhkan melalui:

- Memperkuat moderasi (*Wasathiyah*) sebagai karakter beragama bangsa Indonesia.
- Memperkuat modal sosial yang hidup dalam masyarakat, yaitu menumbuhkan semangat gotong royong, musyawarah, dan kebhinnekaan yang ika.
- Menjadikan ASN, TNI, dan Polri sebagai teladan perekat NKRI.
- Memperbanyak program pertukaran pemuda lintas agama, lintas etnis dan budaya, lintas segmen sosio-ekonomi, dan lintas wilayah.
- Revitalisasi institusi sosial masyarakat terkecil seperti RT/RW, Dusun, dan Kampung sebagai ruang membangun solidaritas sosial, gotong royong, dan ruang dialog antarwarga.

- Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai penjaga toleransi dan mediator masalah antaragama.
- Meningkatkan kesetiakawanan sosial antarwarga dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama, serta dalam penanganan bencana.

#### **5.4. Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya**

Seni budaya adalah DNA bangsa Indonesia. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

- Melaksanakan secara konsisten langkah strategis pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
- Pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan.
- Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, di antaranya dengan diselenggarakannya Jambore Budaya.
- Tata kelola kebudayaan yang terintegrasi dan terencana.
- Merevitalisasi dan meningkatkan pembangunan pusat kebudayaan, museum, dan warisan budaya di daerah-daerah.
- Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata budaya dan industri kreatif.
- Meneruskan pemajuan musik Indonesia melalui perlindungan hak cipta, sistem pendataan terpadu, peningkatan apresiasi dan literasi musik dalam pendidikan, meningkatkan kesejahteraan musisi, maupun penyiapan infrastruktur pendukung.
- Fasilitasi pemajuan film Indonesia dari sisi pembiayaan, infrastruktur pendukung, perlindungan hak-hak pekerja, maupun peningkatan apresiasi masyarakat pada film Indonesia.



### 5.5. Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan

Pemuda, terutama generasi milenial, memiliki peran yang sangat penting dalam pemajuan kebudayaan. Selain itu, pemuda menjadi penentu masa depan bangsa untuk menuju Indonesia Maju.

- Memfasilitasi ruang-ruang kreasi bagi pemuda yang positif, produktif, dan kreatif, di berbagai bidang, seperti di bidang kuliner, musik, *fashion*, *travel*, seni, *science-robotik*, dan bidang-bidang lain yang digemari anak muda.
- Memfasilitasi tumbuhnya ekonomi kreatif anak muda yang kemudian dapat menjadi sumber penghasilan, seperti *YouTuber*, *fashion stylist*, *gamer*, dan lain sebagainya.
- Memfasilitasi keterlibatan anak muda dalam bidang pelestarian lingkungan hidup, seperti komunitas pencinta alam, komunitas peduli sampah, komunitas pencinta hewan, dan sebagainya.
- Memberi kemudahan terhadap kegiatan kemanusiaan yang dilakukan secara digital seperti model *crowdfunding*/urun dana – penggalangan dana kemanusiaan melalui *platform* digital.
- Memfasilitasi peningkatan prestasi pemuda di bidang olahraga, seperti dalam cabang sepak bola, bulutangkis, basket, atletik, dan lainnya.
- Melanjutkan upaya untuk menumbuhkan rasa toleransi yang kuat di kalangan muda sejak dini, melalui revitalisasi kegiatan kebersamaan lintas budaya, lintas suku, dan lintas agama.
- Meningkatkan pencegahan bahaya kekerasan, *bullying*/perisakan, termasuk *online bullying*/perisakan daring, dan lainnya.
- Meneruskan gerakan literasi digital untuk mencegah penyebaran konten negatif serta pemanfaatan internet untuk hal-hal yang produktif.
- Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran

penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

#### **5.6. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi**

Olahraga membangun jiwa bangsa dengan menumbuhkan nilai-nilai sportivitas dan keinginan untuk berprestasi.

- Penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.
- Pengintegrasian olahraga dengan sistem pendidikan nasional dalam rangka menumbuhkan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga, sehingga dapat tumbuh menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa.
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, khususnya di desa-desa.
- Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas kompetisi olahraga Indonesia, khususnya untuk olahraga-olahraga yang dilombakan di Olimpiade, agar menaikkan posisi dan prestasi Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional.
- Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
- Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga.

#### **6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**

Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum serta Negara harus hadir memberikan

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara dan HAM, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara.

### **6.1 Melanjutkan Penataan Regulasi**

Orientasi setiap Kementerian/Lembaga seharusnya bukan lagi memproduksi peraturan sebanyak-banyaknya, namun menghasilkan peraturan yang berkualitas, yang melindungi rakyat, yang mempermudah rakyat, yang memberi keadilan bagi rakyat, serta yang tidak tumpang tindih satu dengan yang lain.

- Memperbaiki proses harmonisasi peraturan perundang-undangan.
- Menyederhanakan regulasi dan menghindari terjadinya pengaturan yang berlebihan.
- Memperbaiki regulasi agar lebih mendukung kreativitas dan kinerja, serta memberikan rasa aman dan rasa adil kepada masyarakat.

### **6.2 Melanjutkan Reformasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum**

Reformasi hukum harus mencakup reformasi sistem dan reformasi internal di institusi penegak hukum untuk menghasilkan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional.

- Melanjutkan reformasi hukum pidana dan acara pidana untuk memastikan penegakan hukum pidana berjalan secara efisien, manusiawi, berkeadilan, dan menjamin kontrol efektif terhadap penegak hukum.
- Bersama Mahkamah Agung menyepakati kerangka hukum bagi agenda perbaikan sistem peradilan perdata.
- Melanjutkan pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan.
- Melanjutkan pemberantasan narkoba dan psikotropika untuk melindungi generasi muda.
- Memberantas premanisme dan pungli untuk memberikan rasa aman, menjamin ketertiban dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat dan pelaku usaha dengan

revitalisasi Saber Pungli dan mengawasi prosesnya sampai di pengadilan.

- Melanjutkan reformasi di lembaga pemasyarakatan, termasuk mengatasi masalah *overcrowding*.

### **6.3 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa meruntuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa serta membawa dampak pada pemiskinan struktural. Untuk melawan korupsi, aspek pencegahan sama pentingnya dengan aspek penegakan hukum yang tegas.

- Melaksanakan secara konsisten Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Meningkatkan sinergi dan kerja sama antar-institusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi.
- Menggiatkan transaksi non-tunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang.
- Mempertegas penindakan kejahatan perbankan dan pencucian uang.

### **6.4 Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM**

Sesuai dengan Konstitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

- Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.
- Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

- Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.
- Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.
- Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.
- Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.
- Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.
- Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.
- Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

## **6.5 Mengembangkan Budaya Sadar Hukum**

Negara hukum akan bisa berdiri kokoh jika ditopang oleh hadirnya budaya sadar hukum. Masyarakat memiliki kesadaran untuk taat dan patuh kepada hukum serta menjadikan hukum sebagai panduan perilaku sosial.

- Meningkatkan pembudayaan sadar hukum di kalangan ASN, TNI, Polri, dan masyarakat.
- Membentuk budaya hukum berlalu lintas sebagai wujud paling mendasar kepatuhan pada hukum.

## **7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga**

Sebagai negara yang berdaulat, Negara wajib ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

### **7.1 Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif**

Haluan politik luar negeri bebas aktif harus terwujud dalam kepemimpinan Indonesia di tingkat regional maupun dunia.

- Memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional, melalui keterlibatan dalam ASEAN dan Dewan Keamanan PBB, dengan mengedepankan *total diplomacy*, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan untuk memperkokoh kepentingan nasional.
- Melanjutkan diplomasi kawasan perbatasan dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
- Memperkuat posisi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berada di antara dua samudera dan dua benua, melalui diplomasi maritim dalam forum IORA maupun Indo – Pasifik.
- Memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan mempromosikan Islam yang moderat (*Wasathiyah*), mempererat *Ukhuwah Islamiyah* sesama Muslim di dunia, serta terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina.
- Meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia.
- Meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri.
- Memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.

## **7.2 Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional**

Kita sudah mulai merintis jalan membangun pertahanan Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Pasifik untuk memperkokoh kedaulatan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara.

- Membangun sistem pertahanan negara yang modern dan TNI yang profesional, dengan menggarisbawahi pentingnya anggaran pertahanan, adopsi dan inovasi teknologi alutsista, industri pertahanan, serta kesejahteraan prajurit.
- Menyelenggarakan diplomasi pertahanan yang sejalan dengan pembangunan kekuatan pertahanan untuk melestarikan upaya pembangunan saling percaya (*confidence building measures, CBMs*) yang telah ada, sekaligus untuk mencegah terjadinya dilema keamanan (*security dilemma*) antara Indonesia dengan negara-negara di dunia.
- Menyelenggarakan reformasi anggaran pertahanan sesuai dengan rancangan pengembangan kekuatan pertahanan.
- Menerapkan mekanisme pengadaan alutsista yang memperhatikan pendekatan daur hidup (*life cycle cost*).
- Melanjutkan pengembangan industri pertahanan menuju kemandirian pemeliharaan, produksi, dan inovasi.
- Mengembangkan sistem keamanan *cyber* dalam kerangka menunjang sistem pertahanan nasional secara keseluruhan.
- Meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya melalui penyediaan gaji pokok yang lebih baik, fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, serta program purnabakti prajurit.

## **7.3 Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelijen yang Profesional dan Terpercaya**

Reformasi keamanan dan intelijen bertujuan memenuhi kewajiban agar Negara hadir melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga negara. Untuk itu, diperlukan langkah berikut ini:

- Melanjutkan reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri.
- Memperkuat koordinasi intelijen negara dengan mengembangkan hubungan kelembagaan yang tegas dan terstruktur dengan garis tugas, kewenangan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
- Mengembangkan profesionalisme anggota Polri dan anggota intelijen yang modern dan andal dengan berbasis teknologi tinggi.
- Menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksekutif yang berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan publik kepada Polri.
- Mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui *proactive policing strategy* dan tindakan humanis dalam menangani setiap permasalahan sosial yang timbul.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota Polri dan anggota intelijen.
- Sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia dengan TNI dan berbagai institusi di dalam pemerintahan.
- Meningkatkan upaya terpadu untuk menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme.

## **8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Tepercaya**

Salah satu karakteristik negara maju adalah memiliki demokrasi yang sehat serta birokrasi yang bersih, efektif, dan tepercaya. Untuk itu, diperlukan aktualisasi demokrasi Pancasila serta reformasi birokrasi dan tata kelola secara berkelanjutan.

### **8.1 Aktualisasi Demokrasi Pancasila**

Pancasila adalah rujukan utama dalam membangun sistem demokrasi kita, sehingga nilai-nilai kerakyatan dan permusyawaratan menjadi pegangan utama, yang perlu terus diaktualisasi dengan cara:



- Memperkuat kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi, dengan melanjutkan konsolidasi kualitas demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
- Meningkatkan keterbukaan informasi publik di setiap Badan Publik.
- Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
- Meningkatkan jaminan hak-hak politik dan kebebasan sipil.
- Mendukung kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi.
- Meningkatkan literasi digital kepada masyarakat, terutama generasi muda.
- Memperkuat mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemilu dan pilkada sehingga menghasilkan pemilu dan pilkada yang demokratis dan berkualitas.

## **8.2 Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional**

Kita harus memiliki Aparatur Sipil Negara yang profesional (*smart ASN*) dan bekerja dalam lingkungan kerja yang berbasis teknologi informasi (*smart office*).

- Meningkatkan sistem rekrutmen ASN yang transparan, memperhatikan proporsi belanja pegawai, serta disesuaikan dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah.
- Mengembangkan sistem penempatan ASN yang memperhatikan kepentingan nasional, terutama pelayanan pemerintahan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- Reformasi pendidikan dan pelatihan ASN agar lebih sinergis, menjadi *learning governance*, bisa sesuai dengan pencapaian kinerja organisasi serta transformasi ke *knowledge management* yang berkelanjutan.
- Mengembangkan tempat kerja yang berbasis teknologi informasi (*smart office*).
- Reformasi sistem remunerasi dan sistem pensiun ASN yang lebih adil, kompetitif dan disesuaikan kemampuan keuangan negara.

- Meningkatkan kesejahteraan ASN dengan penyediaan rumah/tempat tinggal/hunian yang layak dan terjangkau, dukungan fasilitas yang lengkap dan terintegrasi.

### **8.3 Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi**

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu, efektif, dan efisien.

- Melanjutkan *money follow program*, agar anggaran digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
- Melanjutkan upaya penajaman perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada hasil yang berdampak dan bermanfaat bagi rakyat.
- Melanjutkan upaya penghematan anggaran dari belanja yang tidak produktif.
- Melanjutkan penerapan reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diikuti pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang nilai akuntabilitasnya tinggi.

### **8.4 Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang Efektif dan Efisien**

Fokus reformasi kelembagaan adalah membenahi kompleksitas fungsi dan kewenangan lembaga dalam pemerintahan sehingga lebih sinkron dan efisien.

- Melanjutkan penataan kembali lembaga-lembaga yang tumpang tindih dalam fungsi dan kewenangan.
- Reformasi tata hubungan antar-lembaga sehingga lebih sinergis.

### **8.5 Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 mengharuskan pemerintah lebih adaptif dengan membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- Mempercepat penerapan pemerintahan berbasis elektronik, seperti *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, dan *e-reporting*.
- Mempercepat koordinasi pengembangan *e-government* yang terintegrasi.
- Mempercepat penyatuan data (satu data) seluruh instansi pemerintah.

## 8.6 Reformasi Pelayanan Publik

Reformasi pelayanan publik bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, pasti, dan dengan biaya terjangkau.

- Mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk Mall Pelayanan Publik.
- Membangun Hub Inovasi pelayanan publik sebagai pusat pembelajaran, jaringan informasi, dan bimbingan inovasi pelayanan publik.
- Memantapkan reformasi sistem kependudukan nasional.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
- Memantapkan pelayanan publik berbasis *online* yang transparan dan memberikan kepastian, di antaranya melalui *Online Single Submission*.
- Pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, serta membangun model *Whistle Blower System (WBS)* yang dapat diterapkan di sentra-sentra pelayanan seluruh K/L.

## 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah perlu ditata kembali hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

### **9.1 Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis**

Fokusnya adalah menyinergikan tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi.

- Menata hubungan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan bantuan keuangan, sampai pembinaan dan pengawasan.
- Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap daerah otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa, terutama dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan pada masyarakat.
- Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyinergikan kepentingan antar-kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing.
- Menata kembali kebijakan pemekaran wilayah guna memperkuat kedaulatan dan integritas NKRI, serta meningkatkan kapasitas daerah otonom hasil pemekaran.
- Membangun sistem insentif bagi daerah otonom yang berkinerja baik.

### **9.2 Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Memperkuat deregulasi peraturan daerah (perda) dengan mengevaluasi perda-perda yang bermasalah.
- Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengelola anggaran secara tepat sasaran dan berorientasi *outcome*.

- *Money Follow Program* dengan memfokuskan penggunaan anggaran untuk mengembangkan sektor unggulan daerah, upaya penurunan angka pengangguran, menekan kemiskinan dan kesenjangan.
- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan desa untuk mengelola dana transfer daerah dan Dana Desa.
- Mereformasi pelayanan publik dengan menempatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
- Mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.
- Mencegah praktik korupsi di daerah melalui transparansi pengelolaan anggaran.

### **9.3 Mengembangkan Kerja Sama Antar-Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru**

Untuk menggerakkan perekonomian dan peningkatan pelayanan publik, kita perlu mendorong daerah otonom untuk bekerja sama. Sinergi antar-daerah otonom itu akan bisa mengatasi masalah-masalah bersama sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi di wilayahnya masing-masing.

- Mendorong kerja sama antar-daerah otonom dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama seperti masalah transportasi, penanganan limbah, dan juga penanganan masalah dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai.
- Mendorong kerja sama antar-daerah otonom dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing.

**PENUTUP:  
KERJA BERSAMA UNTUK JALAN PERUBAHAN**

Jalan perubahan menuju Indonesia Maju akan dapat tercapai apabila dilakukan dengan kerja keras, kerja sama, dan kerja bersama secara gotong royong oleh semua elemen bangsa. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, kita yakin apa yang menjadi tujuan bersama akan berhasil. Semoga Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang selalu meridhoi upaya kita bersama menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

**Bakal Calon Presiden  
(2019-2024)**

**Bakal Calon Wakil Presiden  
(2019-2024)**

**Ir. H. Joko Widodo**

**Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin**